

Menpora: Saya Tak Intervensi BPK

■ Kisruh Audit Investigasi Hambalang

JAKARTA, TRIBUN - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng membantah mengintervensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal laporan audit investigasi pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Jawa Barat.

"Tidak. Tidak ada intervensi dari saya. Tidak ada niatan intervensi," ujar Menpora di kantor Presiden Jakarta, Minggu (21/10).

Sebelumnya, pimpinan BPK Taufiequrachman Ruki menyebut adanya intervensi pihak tertentu yang membuat nama Menpora hilang dari laporan audit investigasi BPK soal pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Padahal, saat ini kasus korupsi Hambalang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menpora berharap BPK bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan adil. "Saya sebenarnya tidak ingin berpolemik, apalagi dengan sesama menteri (Menkeu)," kata Menpora.

Andi mengakui bahwa dirinya tahu soal proyek Hambalang tersebut. Namun, dirinya tidak mengetahui soal adanya penyimpangan dalam proyek tersebut.

"Saya perlu meluruskan bahwa kalau soal program Hambalang tentu saja saya tahu, tetapi kalau penyimpangan tidak. Justru kita ingin bahwa dengan kita ingin tahu bagaimana duduk perkaranya," papar Andi.

Dia meminta BPK yang melakukan audit dan KPK melakukan pengusutan. "Biarlah semua diproses secara hukum dan sehingga kita tahu apa dan bagaimana duduk perkaranya, bagaimana kejelasannya dan sebagainya," lanjut Andi.

Sementara itu, Taufiequrachman Ruki kembali menegaskan

” Saya perlu meluruskan bahwa kalau soal program Hambalang tentu saja saya tahu, tetapi kalau penyimpangan tidak. ”

ANDI MALLARANGENG

Menpora RI

kepada *Kompas.com* bahwa ada hal gajil dalam audit investigasi Hambalang. Saat bertemu *Kompas* di restoran di kawasan Senayan, Ruki langsung memperlihatkan dua berkas dokumen, yaitu draf hasil pemeriksaan audit investigasi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor dan laporan audit investigasi proyek yang sama.

Laporan audit merupakan dokumen naratif dari draf hasil pemeriksaan. Isi dan substansi kedua berkas tersebut biasanya sama, hanya berbeda penyajian. "Coba bandingkan dua berkas ini," katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007 itu menunjukkan adanya perbedaan fakta dalam dua berkas itu. Pada laporan pertama ada diagram yang menggambarkan aliran dana proyek Hambalang yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta sejumlah perusahaan kontraktor dan subkontraktor seperti Adhi Karya, Wijaya Karya, dan Dutasari Citralaras.

"Kalau sudah tercantum pada berkas hasil pemeriksaan, seharusnya pihak-pihak yang terlibat juga dicantumkan pada laporan audit," kata Ruki.

Anehnya, dalam bagian kesimpulan laporan audit investigasi Hambalang tidak ada nama-nama yang seharusnya tercantum, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malla-

rangeng manajemen dari Adhi Karya, Wijaya Karya, dan Dutasari Citralaras.

"Inilah yang menjadi persoalan. Kalau sudah menjadi te-

muan, seharusnya juga disebutkan dalam kesimpulan laporan audit," kata pensiunan polisi ini.

Menurut Ruki, sebagai menteri, Andi tentu mengetahui banyak tentang proyek Hambalang sehingga harus bertanggung-jawab atas terjadinya berbagai penyimpangan dalam proyek tersebut. Apalagi, penyimpangan proyek itu terjadi sejak awal saat pengurusan surat hak guna pakai untuk proyek tersebut. (tribunnews.com/kompas.com)

news analysis

Harry Pontoh

Sekretaris Komite Kerja Advokat RI

Opini Publik

PERNYATAAN anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrachman Ruki tentang kontroversi intervensi audit proyek Hambalang, perlu diklarifikasi.

Seperti diungkapkan Ruki, ada intervensi sehingga menghilangkan nama Menpora Andi Mallarangeng dalam laporan audit investigasi BPK, padahal dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi dan sejumlah kontraktor.

Pernyataan itu, justru membingungkan. Kita melihat banyak pemberitaan terkesan, tidak jelas siapa yang intervensi siapa. Jadi, ini membingungkan.

Klarifikasi dari Ruki perlu dipertegas, apakah nama seseorang masuk tidak masuk laporan audit BPK harus bergantung temuan? Apakah temuan BPK itu namanya Andi Mallarangeng harus dimasukkan?

Kalau ada informasi adanya ancaman, kalau namanya

tidak masuk dan tidak mau datang, apakah ini pimpinan BPK yang justru mengintervensi?

Ini sebenarnya mekanisme internal di BPK. Persoalannya, kenapa audit BPK belum selesai auditnya, namun masalah ini sudah dibawa ke ranah publik.

Seharusnya, masalah itu diselesaikan dulu secara internal BPK, baru dipublikasikan dan menjadi opini publik. Kalau begini, kan jadi serba salah. Yang disampaikan ke masyarakat seolah AM bersalah dan seolah bukti tidak dimasukkan dan ada intervensi.

Ini sebenarnya sudah bermain di opini publik. Tidak semestinya lembaga negara, seperti BPK begitu. Oleh karena itu, BPK perlu klarifikasi, apakah benar ada nama Andi ada dalam laporan BPK itu. Apa memang sebelumnya ada, atau memang dari awal tidak ada, kemudian mau diadakan. (tribunnews.com/aco)